

Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Oleh:

Yenchilia Tresna Damanik, Aufarul Marom

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bangsa Indonesia. Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang yang salah satu program penanggulangan kemiskinan tersebut yaitu pelatihan keterampilan. Kelurahan Mangunharjo merupakan salah satu kelurahan sasaran program pelatihan keterampilan dengan jumlah warga miskin yang mengalami penurunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pelatihan keterampilan di Kelurahan Mangunharjo mengacu pada kriteria / indikator evaluasi kebijakan yaitu : 1) Efektivitas; 2) Kecukupan; 3) Pemerataan; 4) Responsivitas; 5) Ketepatan dan mengkaji faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program. Indikator efektivitas melihat ketercapaian tujuan dikatakan berhasil dan target sasaran sesuai dengan klasifikasi warga miskin dan database warga miskin. Dalam kriteria kecukupan perbaikan ekonomi masyarakat belum dirasakan tetapi perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir ke arah positif. Dalam indikator pemerataan yang diperoleh pendistribusian dana yang merata dan fasilitas yang diberikan pada masyarakat sudah memadai. Dalam indikator responsivitas program pelatihan keterampilan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta pada indikator ketepatan ditemukan dampak positif dan negatif pelaksanaan program. Faktor pendorong yang mempengaruhi program ini yaitu sosialisasi, partisipasi masyarakat, program pemerintah yang harus dilaksanakan, dan program sesuai dengan kapasitas masyarakat. Adapun faktor penghambatnya yaitu modal, tidak dilaksanakan secara periodik, tidak berkelanjutan, dan peran pendamping masih lemah. Dengan begitu perlunya memaksimalkan monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Kota Semarang.

Kata Kunci : Kemiskinan, Evaluasi Kebijakan, Program Pelatihan Keterampilan

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bangsa Indonesia. Kemiskinan menjadi masalah yang kronis berkaitan dengan masalah kesenjangan dan pengangguran yang dapat menimbulkan permasalahan sosial. Penanggulangan kemiskinan merupakan tugas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari semua pihak dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Program-program penanggulangan kemiskinan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.

Data Jumlah Penduduk Miskin di Kota Semarang 2011-2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
2011	448.398
2013	373.978
2015	367.848

Sumber : Diolah dari Laporan Bappeda Kota Semarang tentang Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang mengupayakan percepatan penanggulangan kemiskinan mengingat tingginya angka kemiskinan di Kota Semarang. Pada tahun 2014-2015 Kelurahan Mangunharjo telah melaksanakan program pelatihan keterampilan pada masyarakat miskin di kelurahan tersebut. Pada pelaksanaan program tersebut tidak semua masyarakat hadir dalam pelaksanaan program dikarenakan kebanyakan pekerjaan masyarakat miskin itu buruh harian lepas.

Jadi, pola pikir masyarakat miskin yang tidak ikut dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut implikasi dari program tersebut kurang berpengaruh dalam mengeluarkan warga dari kemiskinan. Disamping itu masyarakat miskin di Kelurahan Mangunharjo memiliki tingkat pendidikan masih rendah. Modal seberapa besar pun akan habis begitu saja karena masyarakat tidak pintar dalam mengelola keuangan.

Begitu juga dalam program yang telah dilaksanakan di Kelurahan Mangunharjo kegiatan yang telah dilaksanakan tidak ada sinkronisasi diantaranya ada kegiatan dalam pengolahan makanan yang mana masyarakatnya miskin menerima bantuan tidak diberikan pelatihan untuk memasarkan produk mereka. Disamping itu produk yang dihasilkan masyarakat tidak mempunyai merek dagang. Ketidakmampuan bersaing dengan produk yang telah sejak lama beredar pada masyarakat disebabkan pangsa pasar yang belum kuat. Selain itu, masyarakat juga belum tahu bagaimana cara pengembangan produk. Masyarakat miskin belum mampu berinovasi terhadap produk yang telah mereka buat.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah tujuan program pelatihan keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang sesuai tujuan yang telah dibuat.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat program pelatihan keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang

C. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Administrasi Publik

Secara global administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan cakupan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. (Syafiie, 2006 : 24).

2. Kebijakan Publik

James E. Anderson (dalam Subarsono 2011 : 2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

3. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi Kebijakan Publik merupakan kegiatan mengukur suatu kebijakan berhasil atau gagal berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indikator evaluasi kebijakan menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil (dalam Indiahono, 2009 : 145).

4. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut James Anderson ada tiga tipe evaluasi kebijakan publik yang didasarkan pada pemahaman para evaluatur terhadap evaluasi. Tipe pertama, evaluasi dipahami sebagai kegiatan fungsional. Pertimbangan-pertimbangan ini memberi kesan bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah dan dipengaruhi seperti ideologi, stakeholder, dan kriteria lainnya. (Winarno, 2012 : 230-231). Tipe kedua yaitu tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada kinerja kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi kebijakan ketiga yaitu tipe evaluasi yang sistematis. Program-program dilihat secara objektif untuk mengukur

dampak dan tujuan yang telah tercapai. (Winarno, 2008 :229)

5. Pendekatan terhadap Evaluasi

1) Evaluasi Semu

Evaluasi semu adalah pendekatan yang menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan pada individu, kelompok, atau masyarakat.

2) Evaluasi Formal

Pendekatan evaluasi ini menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3) Evaluasi Keputusan Teoritis

Pendekatan evaluasi ini menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders.

6. Indikator Evaluasi

Kebijakan berhasil atau gagal dinilai dari indikator-indikator yang telah dikembangkan.

William Dunn mengembangkan lima indikator atau kriteria evaluasi mencakup sebagai berikut (Subarsono, 2011 :126) :

No	Kriteria	Penjelasan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
4	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan membuat preferensi/ nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber : W. Dunn dalam Subarsono (2011

: 126)

7. Evaluasi Proses

Evaluasi *ex-ante* sering juga disebut analisis atau *assesment* yang mencakup evaluasi perkiraan implementasi dan dampak yang terjadi sesudah implementasi serta konsekuensinya. Evaluasi implementasi tidak dapat dilepaskan dari kerangka input-output sehingga penelitian mengenai evaluasi implementasi didalamnya mengandung kerangka *input-output* (Suwitri, 2011 : 92). Evaluasi *ex-post* merupakan evaluasi dampak kebijakan. Sasaran evaluasi *ex-post* mempunyai persamaan dengan evaluasi implementasi yang tidak terlepas dari kerangka *input-output*.

D. Metode Penelitian

1) Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan yang saat ini berlaku dengan kondisi-kondisi sekarang yang berlaku. Kirk dan Miller (dalam Moleong 2009: 4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

2) Lokus Penelitian

Situs atau lokasi penelitian adalah tempat dimana persoalan dan atau penelitian terjadi. Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang.

3) Subjek Penelitian

1. Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.
2. Kepala Seksi Manajemen Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tembalang.
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Mangunharjo.
5. Warga miskin Penerima Program.

4) Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2009 :157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui

Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer

Data yang didapat langsung dari sumber pertama, baik individu/ perseorangan seperti hasil wawancara dengan informan atau hasil dari observasi/ pengamatan langsung yang dilakukan peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang terkait dengan suatu peristiwa-peristiwa yang sudah ada sebelumnya yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, laporan hasil penelitian, artikel-artikel, serta bentuk-bentuk yang dapat memberikan informasi dalam.

5) Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik *Interview* (wawancara)

Pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan informan sebagai narasumber. Instrumen yang digunakan disini adalah pedoman wawancara atau *interview guide*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data diperlukan karena tidak semua data terdapat dilapangan, tetapi harus mencari terlebih dahulu melalui dokumen-dokumen yang ada, buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat dan lain lain.

3. Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih jelas. Teknik ini memungkinkan peneliti menarik informasi (kesimpulan) ihwal

makna dan sudut pandang narasumber, kejadian, peristiwa atau proses yang diamati.

6) Analisis Data

Analisis data menurut Bognan dan Biklen (dalam Moleong, 2009 : 248) merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya dengan satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari

7) Kualitas Data

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan adalah teknik triangulasi data. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan, apakah proses, dan hasil sudah dapat dipahami oleh peneliti berdasarkan apa yang disampaikan informan maupun keadaan lapangan (dalam Sugiyono, 2009: 241). Peneliti mengumpulkan data dengan menggabungkan wawancara mendalam, observasi tidak terstruktur dan dokumentasi dari data Laporan Kelurahan Mangunharjo.

PEMBAHASAN

1. Hasil Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang

a) Efektivitas

Efektivitas mengandung pengertian taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, hak ditinjau dari segi hasil, maupun usaha dari segi usaha yang diukur. Berdasarkan hasil temuan di lapangan pelaksanaan program pelatihan keterampilan dapat dikatakan berhasil karena diterima cukup baik oleh masyarakatnya. Peran aktif dari masyarakat dengan adanya program

pelatihan ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam penanggulangan kemiskinan mengingat program pemerintah ini mempunyai manfaat yang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat miskin.

Data Warga Miskin di Kelurahan Mangunharjo

Tahun	Jumlah Total Warga Miskin
2011	1.963
2013	1.337
2015	1.299

Sumber : simgakin.semarangkota.go.id

Penurunan ini menjadi bukti bahwa adanya program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kelurahan Mangunharjo berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Pemerintah telah melakukan program pelatihan keterampilan ini sesuai dengan target yaitu warga miskin yang ada pada database warga miskin Kota Semarang.

b) Kecukupan

Pengertian kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan dalam menjawab persoalan yang dalam masyarakat miskin. Berdasarkan penelitian mengenai gejala perbaikan ekonomi yang dilihat dalam indikator kecukupan bahwa perbaikan ekonomi masyarakat masih belum dirasakan kebanyakan warga miskin yang mengikuti program pelatihan keterampilan. Hanya segelintir masyarakat yang memang sudah merasakan perbaikan ekonomi karena adanya program pelatihan ini. Dilihat dari segi perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir bahwa program pelatihan keterampilan ini sudah dapat memberikan

perubahan. Sikap masyarakat miskin yang selama ini hanya berharap pada bantuan pemerintah selama ini berubah menjadi masyarakat yang lebih proaktif dalam mengakses program-program kemiskinan yang digulirkan pemerintah di Kelurahan Mangunharjo.

c) Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat juga diartikan suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari suatu kebijakan publik. Berdasarkan data temuan di lapangan oleh peneliti terkait dengan gejala pendistribusian dana yang dilakukan sudah adil yang disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan Mangunharjo. Masyarakat penerima program juga mengatakan bahwa beliau mendapatkan transeferan dana untuk membeli peralatan untuk melakukan pelatihan keterampilan. Dilihat dari fasilitas yang diberikan kepada masyarakat sudah dapat dikatakan baik dari pemberian peralatan pelatihan, tempat pada saat pelatihan, kondisi peralatan yang ada, dan masih memperoleh uang saku bagi masyarakat miskin yang ikut dalam program pelatihan keterampilan

d) Responsivitas

Responsivitas dapat juga dikatakan respon dari suatu aktivitas. Menurut William N Dunn bahwa indikator responsivitas itu dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat (Dunn, 2000 : 437). Kriteria responsivitas melihat kesesuaian antara program pelatihan keterampilan dengan keinginan masyarakat ataupun kebutuhan masyarakat. Pemilihan kegiatan dalam pelatihan atas rekomendasi masyarakat miskin di Kelurahan Mangunharjo.

e) Ketepatan

Ketepatan merujuk pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Secara keseluruhan dampak positif dari pelaksanaan program ini sudah dapat dirasakan. Yang mana masyarakat memperoleh bekal keterampilan yang

awalnya tidak tahu menjadi tahu. Dampak positif yang dirasakan bahwa masyarakat jadi termotivasi dalam membuka suatu usaha karena pengertian-pengertian tersebut sudah diberikan jadi membuat masyarakat miskin memiliki keberanian dalam membuka suatu usaha dari bekal yang didapat. Sisi lain selain memberi dampak positif ternyata program ini membawa ke arah negatif. Seperti yang dikatakan Kepala Pelayanan Sosial bahwa program ini Ibu-ibu yang mengikuti program perannya dalam keluarga menjadi berkurang terlebih lagi kepada anak-anaknya.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang

a) Faktor Pendorong Program Pelatihan Keterampilan

1. Sosialisasi

Berjalannya satu program dengan baik karena dilakukan dengan sosialisasi yang baik pula. Sosialisasi yang dilakukan di Kelurahan Mangunharjo mulai dari kegiatan rutin warga pada tingkat RT dan RW selain itu memanfaatkan wadah yang sudah ada seperti PKK dalam melakukan sosialisasi program pelatihan keterampilan ini. Melalui sosialisasi ini masyarakat menjadi mudah untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

2. Partisipasi Masyarakat

Dengan adanya program pelatihan ini masyarakat menanggapi serius karena mereka ingin lebih maju. Partisipasi masyarakat miskin di kelurahan ini cukup tinggi. Dapat dilihat dari masyarakat mau berkumpul untuk mensosialisasikan program pelatihan

ini yang kemudian mereka mengadakan rebug warga untuk menggali potensi-potensi apa saja yang dapat dikembangkan.

3. Program Pemerintah yang harus Dilaksanakan

Adanya program pelatihan ini merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan. Memang tugas dari pemerintah berdasarkan UUD 1945 bahwa pemerintah mempunyai tugas dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara dan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal inilah dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

4. Program Pelatihan Yang Diberikan Sesuai Dengan Kapasitas dan Dapat Diterima Masyarakat

Dikatakan program pelatihan ini sesuai dengan kapasitas masyarakat karena keterampilan yang dilatih sesuai dengan usulan-usulan dari masyarakat miskin sendiri yang direkomendasikan dari potensi yang ada dalam diri mereka.

b) Faktor Penghambat Program Pelatihan Keterampilan

1. Modal

Salah satu penghambat ketidakberlanjutan program ini dari masyarakat miskin karena terkendala dengan modal. Strategi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui program pelatihan keterampilan sangatlah bagus tetapi jika masyarakat tidak melanjutkan program tersebut karena berbenturan masalah modal hal ini sangat disayangkan.

2. Program Pelatihan Dilaksanakan Tidak Secara Periodik
Didalam peraturan daerah juga disebutkan bahwa pelatihan yang dilakukan secara periodik. Pada kenyataannya di lapangan bahwa SKPD pelaksanaan melakukan kegiatan dari satu keterampilan hanya dilakukan sampai 3 hari. Selesai selama 3 hari tersebut tidak ada lagi pelatihan di hari lain terkait dengan satu kegiatan tersebut
3. Program Yang Dilaksanakan Tidak Berkelanjutan
Temuan peneliti di lapangan bahwa pelaksanaan satu kegiatan pelatihan itu hanya sampai 3 hari saja. Selesai dari 3 hari dari SKPD tidak menindaklanjuti bekal tersebut mau dibawa kemana arahnya
4. Peran Pendamping Masih Lemah
Pendamping yang dimaksud disini ialah perguruan tinggi seperti PTN / PTS dan CSR seperti bank atau Perbankan. PTN memang datang untuk mendampingi seperti dosen atau mahasiswa yang dianggap berkompeten didatangkan, tetapi praktiknya di lapangan dirasakan masih kurang seimbang karena lebih banyak memberikan kepada masyarakat tentang teori. Pihak CSR sendiri perannya juga belum maksimal dikarenakan masyarakat belum merasakan dari segi perbaikan pembukuan ataupun konsultasi masih belum diperoleh masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketercapaian Tujuan Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang

a) Efektivitas
Penanggulangan kemiskinan melalui program pelatihan keterampilan di

Kelurahan Mangunharjo bahwa tujuan dari program ini sudah tercapai. Tercapainya tujuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dapat diukur dengan warga miskin menjadi terentaskan dengan penurunan angka kemiskinan di Kelurahan Mangunharjo dari tahun 2011-2015. Selain penurunan angka kemiskinan, partisipasi masyarakat miskin dirasakan meningkat di Kelurahan Mangunharjo seperti dalam rembug RT dan RW yang dilaksanakan sebulan sekali. Target sasaran program keterampilan merupakan masyarakat miskin yang sesuai dengan klasifikasi warga miskin Kota Semarang. Walaupun pada pelaksanaan sasaran program ini belum menysasar 100 % pada masyarakat miskin tetapi dari Pemerintah Kota Semarang telah berusaha sesuai dengan database yang ada.

b) Kecukupan

Perbaikan ekonomi masyarakat miskin belum dapat dirasakan maksimal oleh warga miskin yang mengikuti program pelatihan keterampilan di Kelurahan Mangunharjo. Program pelatihan ini belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara signifikan. Hanya segelintir masyarakat yang merasakan perbaikan ekonomi karena melanjutkan bekal pelatihan tersebut untuk membuka suatu usaha. Dari sisi lain seperti perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir dengan program pelatihan keterampilan ini memberikan perubahan. Masyarakat lebih proaktif dalam mengakses program-program penanggulangan kemiskinan, masyarakat miskin dari perilaku konsumtif berubah menjadi lebih produktif, dan dari pola pikir masyarakat tidak maju sudah mengarah pada lebih maju.

c) Pemerataan

Pendistribusian dana yang dilakukan SKPD pelaksana sudah merata dan wajar yang sesuai dengan kebutuhan Kelurahan Mangunharjo. Dana yang ada langsung ditransfer ke kelompok yang ikut dalam program pelatihan keterampilan. Dilihat dari fasilitas yang diberikan masyarakat

dikatakan sudah memadai. Hal itu dibuktikan dengan pembelian peralatan yang masih baru dan tempat pelaksanaan pelatihan yang memadai yang dilaksanakan di balai Kelurahan Mangunharjo.

d) Responsivitas

Program pelatihan keterampilan yang dilaksanakan di Kelurahan Mangunharjo sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat dituangkan dalam kegiatan keterampilan yang dilaksanakan. Dengan demikian pelatihan keterampilan tersebut disesuaikan dengan potensi masyarakat miskin. Potensi tersebut berdasarkan rembug warga pada tingkat RT dan RW selanjutnya naik ke tingkat kelurahan untuk menetapkan kegiatan keterampilan yang akan dilaksanakan, sehingga dari kegiatan yang sudah ditetapkan pemerintah pelaksana akan memfasilitasi kegiatan tersebut.

e) Ketepatan

Dampak positif dari program ini sudah dapat dirasakan secara luas. Dapat dirasakan masyarakat mempunyai motivasi menjadi wirausaha walaupun masyarakat sering terkendala dengan modal. Masyarakat juga diajak untuk berkreatifitas dengan bekal yang diterimanya untuk membuka suatu usaha dan menghilangkan pikiran bahwa yang mempunyai pendidikan tinggi secara formal biasanya dapat membuka usaha. Peran ibu untuk anak-anaknya dirasakan berkurang karena mengalami kesibukan-kesibukan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang

a) Faktor Pendorong Program Pelatihan Keterampilan

1. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan wadah yang ada seperti pertemuan tingkat RT, RW, dan PKK merupakan sarana yang efektif mengingat dana operasional yang ada juga terbatas. Sehingga masyarakat miskin merasakan keterbukaan informasi hal itu berdampak adanya kesamaan pemahaman warga miskin dengan pemerintah pelaksana program pelatihan keterampilan

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat di Kelurahan Mangunharjo dapat dikatakan sudah cukup tinggi. Dapat dilihat dari masyarakat yang berperan aktif dalam rembug warga untuk menggali potensi / keterampilan apa yang dapat dikembangkan yang nantinya akan dimasukkan kedalam musrenbang

3. Program Pemerintah Yang Harus Dilaksanakan

Adanya program ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Kota Semarang dalam menjamin, menghormati, dan melindungi dalam pemenuhan hak-hak dasar warga miskin.

4. Program Pelatihan Yang Diberikan Sesuai Dengan Kapasitas dan Dapat Diterima Masyarakat

Program pelatihan keterampilan ini sesuai dengan kapasitas masyarakat miskin karena kegiatan-kegiatan pelatihan tersebut sesuai dari rekomendasi dari masyarakat miskin dan kegiatan tersebut melihat potensi masyarakat miskin yang dapat dikembangkan.

b) Faktor Penghambat Program Pelatihan Keterampilan

1. Modal

Masyarakat yang sudah mendapat bekal keterampilan sering kali

terkendala dengan masalah permodalan awal dalam membuka suatu usaha. Dalam pemenuhan kebutuhannya saja masyarakat dapat dikatakan masih terbatas sehingga masyarakat tidak jarang setelah pelaksanaan pelatihan berhenti karena terbatas dari segi permodalan.

2. Program Pelatihan Dilaksanakan Tidak Secara Periodik

Didalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang seharusnya pelatihan dilakukan secara periodik namun pada pelaksanaannya program pelatihan dilaksanakan hanya 3 hari pada satu kegiatan. Hal ini dirasakan masyarakat kurang maksimal mengingat kebanyakan penerima program ini pada awalnya tidak mempunyai bekal sama sekali tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

3. Program Yang Dilaksanakan Tidak Berkelanjutan

Program pelatihan keterampilan ini tidak berkelanjutan. Selesai dari jadwal yang telah direncanakan tidak ada keberlanjutan akan dibawa kemana bekal yang telah diterima masyarakat miskin. Masyarakat penerima program dilatih tanpa ada dukungan dari pemerintah pelaksana juga tidak akan bisa berkembang. Fungsi pengawasan dan evaluasi setelah pelaksanaan program kurang berjalan semestinya.

4. Peran Pendamping Masih Lemah

Konsep pendampingan yang ada masih kurang efektif dirasakan masyarakat penerima program dan pihak Kelurahan Mangunharjo. Pendamping yang dimaksud seperti Perguruan Tinggi dan CSR seperti

Bank atau Perbankan. Kenyataannya di lapangan antara teori dan praktik kurang seimbang.

B. Saran

1. Perlunya komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti bekal keterampilan dibuat menjadi usaha, sehingga melalui usaha tersebut masyarakat miskin menghasilkan uang dengan harapan dapat memperbaiki ekonomi keluarganya. Selanjutnya, untuk keterampilan yang mulai jalan seperti batik ciprat dan telur asin perlu diadakannya pelatihan mengenai penjualan hasil produksi ataupun memfasilitasi masyarakat dengan membuka *stand* penjualan pada saat ada acara Kantor Pemerintahan di Kota Semarang ataupun kerjasama pemerintah dengan usaha menengah dengan cara penitipan produk yang dihasilkan ke toko-toko yang ada di Kota Semarang dengan sistem bagi hasil.
2. Mengajak masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke atas untuk berpartisipasi dalam peminjaman modal, dengan cara pembuatan aplikasi *start-up* investasi. Jadi, masyarakat menengah ke atas menginvestasikan sejumlah modal dengan nominal Rp 50.000,00 melalui aplikasi *start-up* tersebut dengan ketentuan bagi hasil seperti 25% bagi pemilik modal dan 75% bagi pelaku usaha. Selain itu, memaksimalkan staf-staf pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan pelatihan keterampilan dilaksanakan misalnya dua kali dalam setahun karena kebanyakan masyarakat penerima program pelatihan keterampilan tidak mempunyai bekal sama sekali. Disamping itu, memaksimalkan monitoring dan evaluasi SKPD sesudah program pelatihan dilaksanakan sampai dengan masyarakat miskin tersebut mendirikan suatu usaha dari bekal yang

diterima. Didukung dengan memaksimalkan peran pendamping seperti Perguruan Tinggi dan CSR dengan cara memberikan seminar ke masyarakat miskin ataupun memberi pelatihan pembukuan tentang laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media

J. Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset

Nugroho D, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Rahardjo, M Dawam. 2006. *Menuju Indonesia Sejahtera Upaya Konkret Pengentasan Kemiskinan* . Jakarta : Khanata-Pustaka LP3S Indonesia dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS

Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2015

Daftar Isian Potensi dan Tingkat Perkembangan Kelurahan Tahun 2015

Laporan Bulanan Monografi Kelurahan Mangunharjo Tahun 2016

Regulasi :

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 4 tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang nomor 18C tahun 2009 tentang Indikator, Kriteria, dan Klasifikasi Warga Miskin Kota Semarang.